

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masa depan tidak pernah dapat ditebak akan menjadi seperti apa. Resiko dimasa depan dapat terjadi terhadap kehidupan manusia misalnya kematian, jatuh sakit, kecelakaan, atau dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia Bisnis yang dilakukan manusia juga mempunyai resiko yang tidak disangka-sangka akan terjadi seperti terjadinya kebakaran, kerusakan akibat bencana alam, atau kehilangan, oleh karena itu setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi untuk menekan angka kerugian.

Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan di masa depan, seperti halnya resiko kehilangan, resiko kebakaran, resiko kecelakaan, baik itu kecelakaan yang disebabkan *human error* atau kecelakaan yang berasal dari alam, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengaitkan diri dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan mendapatkan suatu kerugian.

Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) dijelaskan bahwa:¹

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepada ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti ...”

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Koophandel Voor Indonesie*)

Seseorang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa asuransi yang disebut nasabah ini nantinya akan melaksanakan pertanggungan. Di dalam KUHD pasal 255 dijelaskan bahwa “Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama Polis.” ...²

Asuransi merupakan bentuk investasi untuk melindungi diri sendiri maupun orang sekitar kita dari risiko hilangnya kesehatan, properti, kemampuan secara fisik, kematian dan lain sebagainya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pada kegiatan asuransi yang dimaksud tertanggung adalah konsumen, nasabah, atau pemegang polis. Konsumen adalah tulang punggung dari

²*Ibid*

perusahaan asuransi. Berjalan atau tidaknya perusahaan asuransi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan konsumen. Oleh karena itu konsumen menjadi pembahasan yang penting dalam kegiatan asuransi. Kepercayaan konsumen bergantung pada pengelolaan dananya oleh perusahaan asuransi. Meningkatkan pelayanan kepada konsumen menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen.

Dalam kegiatan perasuransian dibuat aturan yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak baik pelaku usaha yaitu perusahaan asuransi maupun konsumen atau pemegang polis dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya pihak yang dirugikan. Aturan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak diatur dalam sebuah aturan tertulis atau disebut perjanjian atau polis. Dalam melakukan kegiatan perasuransian lazimnya dibuat sebuah kontrak yang memuat aturan mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan Pasal 55 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya ditulis secara bergantian antar UU No. 21 Tahun 2011 dan atau UU OJK³ menyatakan: sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5253

lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang–undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan⁴.

Majelis hakim menilai bahwa ASM tidak bisa menjaga kesehatan keuangan (solvabilitas) dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kewajiban para pemegang polis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1a dan 1b Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian setelah izin usahanya dicabut oleh Kementerian Keuangan pada 28 Desember 2012.

Tingkat pencapaian solvabilitas debitur terbukti kurang dari 120%, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Jumlah kekayaan ASM sebesar Rp 62,53 miliar, sedangkan jumlah cadangan teknis ditambah utang klaim retensi sendiri Rp 76,31 miliar. Debitur dinilai tidak memenuhi Pasal 11 ayat 1a dan 1b Undang-undang No. 2/1992 tentang Perasuransian. Perusahaan [asuransi](#) wajib menjaga solvabilitas atau kesehatan [keuangan](#) dalam menjalankan usahanya agar dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada [pemegang polis](#).

Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum OJK Rizal Ramadhani menyambut baik putusan majelis hakim tersebut. "Putusan majelis sudah tepat karena memang tujuan dari permohonan pailit adalah untuk melindungi kreditur.

Adanya polis atau kontrak seharusnya menjadi penyelesaian dalam segala masalah yang akan timbul dari kegiatan usaha, akan tetapi dalam

⁴ Lihat Pasal 1 angka 36 Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

prakteknya kontrak baku atau klausula baku dalam polis menjadi masalah dalam kegiatan usaha asuransi, kontrak baku yang dibuat tanpa itikad baik justru menimbulkan masalah dikemudian hari karena ada pihak yang merasa dirugikan dari kegiatan usaha yang dijalani, disinilah pentingnya good faith atau itikad baik dalam berkontrak.

Tindakan pelaku usaha di sini sebagai perusahaan asuransi sangat merugikan konsumen. Banyaknya pengaduan-pengaduan oleh konsumen yang merasa dirugikan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam pembayaran klaim ganti rugi perusahaan asuransi kepada konsumen atau pemegang polis. Sudah sepatutnya pemerintah sebagai pelindung masyarakat mengambil tindakan dari kegiatan pelaku usaha yang tidak adil dan merugikan konsumen atau pemegang polis asuransi, hal ini dibuktikan oleh pemerintah dengan mengesahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum untuk melindungi kepentingan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut seorang nasabah nantinya membuat suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan yang bersifat konsensual (adanya kesepakatan antara nasabah dan perusahaan asuransi), pada umumnya harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan polis yaitu merupakan tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti

tertulis. Dalam perjanjian tersebut biasanya nasabah dan perusahaan asuransi akan menyepakati premi dan klaim asuransi.

Pada perkembangannya tidak selamanya permasalahan atau resiko di masa depan terjadi hanya pada nasabah, melainkan juga dapat terjadi pada perusahaan asuransi. Beberapa kasus ditemukan perusahaan asuransi mengalami permasalahan yang menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga. Pailit adalah keadaan dimana seorang debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo, pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja melainkan didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan.⁵

Sebagai contoh adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup izin usaha PT Asuransi Syariah Mubarakah berdasarkan laporan keuangan Triwulan I-2010 rasio tingkat pencapaian solvabilitas ASM kurang dari 120% Pasalnya, diketahui jumlah kekayaan ASM saat itu sebesar Rp. 62,53 Milliar. Sedangkan jumlah cadangan teknis ditambah utang klaim retensi sendiri Rp. 76,31 Miliar. Saat itu juga OJK sudah memberikan peringatan kepada ASM sebanyak tiga kali untuk segera memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, namun peringatan tersebut tidak direspon oleh ASM, maka pada tanggal 28 Desember 2012 berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan memutuskan mencabut izin usaha. Selain melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, ASM juga memiliki dua atau lebih kreditur dengan

⁵ Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit), Ctk.Pertama, FH UII Press,Yogyakarta,2016, hlm 45

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis.⁶

Jika terjadi kejadian serupa bagaimana nasib dari nasabah yang telah membayar preminya dan bagaimana apabila perusahaan asuransi jatuh tempo untuk segera membayar klaim asuransi yang diajukan nasabah. Hak pemegang polis untuk menarik unit bagi sebagian maupun seluruhnya dari perusahaan asuransi dapat dianggap sebagai utang, namun kedudukannya hanya sebagai kreditur konkuren, yang artinya tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan lebih dahulu daripada kreditur yang lain (karena piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu, misalnya Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia). Dari penjelasan tersebut sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau sistematis perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi. Dalam praktik jaminan hak-hak pemegang polis sendiri tidak pernah ada pencantuman di dalam perjanjian asuransi sendiri (polis).

Dari isu hukum mengenai perlindungan terhadap pemegang polis asuransi, penulis tertarik dan memilih penelitian hukum yang penulis beri judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI (Studi Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016).**

⁶Wan Ulfa Nur Zuhra, *Nasib Sial Pemegang Polis Saat Izin Asuransi Dicabut*, dalam www.tirto.id, diakses pada 12 Desember 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dari latarbelakang di atas, ada beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis atas perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit dalam putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 ?
2. Apakah unsur asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terpenuhi dalam pemberesan harta pailit dalam putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisa kembali mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi apabila suatu perusahaan asuransi pailit, maka penelitian ini ditujukan :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.
- b. Untuk mengetahui apakah unsur asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terpenuhi dalam pemberesan harta pailit dalam putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat serta kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

- a. Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan seputar hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas.
- b. Penelitian ini juga sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana, sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan pengembangan pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta meng-*upgrade* informasi seputar perlindungan hukum nasabah asuransi di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Penulisan hukum ini juga diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi kalangan praktisi maupun pelaku kekuasaan dalam menjalankansistem asuransi terutama dalam bagian hukumnya di

Indonesia, sehingga menjadi pertimbangan obyektif dan wacana perbaikan kualitas pelayanan asuransi serta adanya kepastian hukum.

E. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi melalui:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁷ Menurut Good Heart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil.⁸

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.⁹

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.

⁷Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 119

⁸Ian McLeod. 1999. *Legal Method*. London. Penerbit Macmillan. Hlm. 144

⁹Johnny Ibrahim. 2010. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Penerbit Bayu Media. Hlm. 321

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum masalah yang dihadapi.¹⁰

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad "bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu".¹¹ Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer meliputi :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen;
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm. 132

¹¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar. Hlm 157

iii. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa dan elektronik yang relevan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi dokumen, studi kepustakaan (*library research*) dan studi internet, yang dimaksud adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum yuridis normatif.¹²

¹²Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm. 392

Penulisannya sendiri akan didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti buku-buku pustaka, artikel ilmiah internet, majalah, surat kabar dan buletin tentang segala permasalahan yang relevan dengan penelitian hukum ini.

4. Teknis Analisa Bahan Hukum

Tahap analisa bahan hukum yaitu menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sedangkan analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisa permasalahan dengan konsep dan bahan hukum terkait. Sehingga akan muncul solusi dari permasalahan hukum yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis. Dimulai dari Bab I sampai dengan Bab IV yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis. Dimana teori-teori tersebut akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori mengenai: (1) Tinjauan Umum tentang Asuransi; (2) Tinjauan Umum tentang Kepailitan;

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok bahasan sebagai obyek kajian dalam penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Problematika tersebut akan diuraikan dengan sistematika penulisan serta penggunaan bahan hukum yang telah disebutkan di atas, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini. Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan Bab III, dan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.